

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA SALATIGA

Wiwin Setyaningrum¹

Suci Atiningsih²

*Program Studi Akuntansi, STIE Bank BPD Jateng

ABSTRACT: *Research aims to understand the influence of the application of regional financial accounting system, human resources and internal control system on the quality of local government financial statements with a commitment organization as moderation in Salatiga Regency. This research using data primary. The samples serve as respondents taken by using the sampling method of purposive. Each population represented 3 respondents is the financial officer, treasurer, and staff treasurer. A questionnaire distributed to 66 respondents, and successfully reassembled with complete answers are obtained from 60 respondents. Analysis data using of multiple regression with the help of software SPSS.*

The result showed that government accounting system, internal control system, the accounting system are the significant effect on the quality of financial reports to the level of significance $< 0,05$. While the results of human resources is no effect to the quality of financial reports on the level of significance $> 0,05$. Regression analysis coefficient of determination (R^2) of 0,696 or 69,6% which means that the independent variable in this study could affect the dependent variable, while the rest 30,4% is explained by other variables not included in this study.

Keywords : *quality of local government financial statements, regional financial accounting system, human resources, internal control system, commitment organization*

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang wajib dan harus dilakukan secara terus-menerus dalam setiap periode yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tujuan organisasi dan ketepatan sasaran yang telah dirancang (Evicahyani dan Setiawina, 2016). Laporan keuangan adalah laporan yang dibuat Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta

secara terstruktur berdasarkan transaksi yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan. Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan harus mampu bermanfaat dan berguna bagi pengguna sebagai dasar dalam membuat keputusan dan dalam menilai akuntabilitas (Armel, 2017).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga menekankan pentingnya karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang dihasilkan agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif yang digunakan oleh IAI adalah dapat dipahami (*understandability*), relevan, keandalan (*reliability*), dan daya banding (*comparability*)”

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menunjukkan baik atau buruknya kualitas suatu laporan keuangan yaitu opini audit dari BPK. Anggota I BPK RI menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dana negara di Indonesia menjadi dasar dari peningkatan WTP. Kualitas informasi yang sudah dianggap andal harus mampu menjadi dasar atau landasan pada pengambilan keputusan, terutama yang sudah mendapat opini WTP (suaramerdeka.com).

Menteri Keuangan, Mulyani (2018) masih banyak kementerian/lembaga serta pemda yang setelah mendapat WTP merasa sudah cukup, padahal predikat WTP bukanlah tujuan akhir. Laporan keuangan itu harusnya dipakai sebagai alat *feedback* membuat perencanaan lebih baik. Perbaikan pengelolaan negara bertujuan meningkatkan kualitas penggunaan keuangan negara yang lebih baik (www.ekonomi.kompas.com). Kepala BPK Jawa Tengah mengatakan bahwa tingkat opini ada 4 yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
4. Tidak Wajar (TW)

Keempat opini tersebut diberikan berdasarkan kepatuhan pada perundang-undangan, kesesuaian pada standar akuntansi pemerintah (SAP) yang berlaku, kecukupan pengungkapan dan efektivitas pengendalian internal. Pemerintah daerah harus melakukan perbaikan dalam sistem pengendalian intern dan komitmen pimpinan pemerintah daerah bersama BPK yang harus melakukan pengawasan untuk memperoleh opini WTP (www.radioidola.com).

BPK Perwakilan Jawa Tengah telah melaksanakan audit secara periodik untuk menilai kualitas laporan keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK berupa grafik. Grafik tersebut menggambarkan pertumbuhan opini LKPD yang ada di seluruh Jawa Tengah.

LANDASAN TEORI

Stewardship theory adalah keadaan dimana pegawai lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan individu (Donaldson, 1989). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan pada paragraf 35 menjelaskan “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; dan (d) Dapat dipahami.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bahwa “SAKD adalah “serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer” (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya (Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Pasal 3). Penelitian Risman dan Kamilah (2018) menjelaskan bahwa dengan adanya Peraturan ini, PNS mampu melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 1).

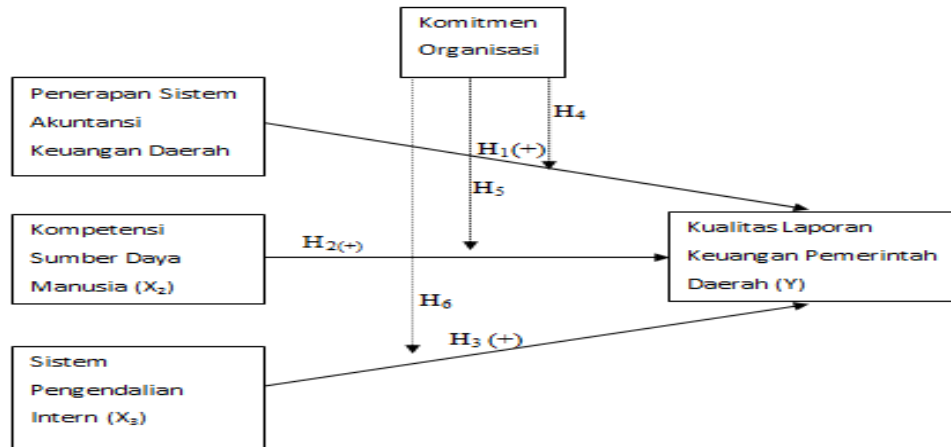
Komitmen organisasi merupakan suatu keinginan/kemauan seseorang supaya tetap bertahan di dalam suatu organisasi. Sanjaya (2017), komitmen organisasi merupakan hubungan antara organisasi dan individu, dimana individu mempunyai keinginan agar tetap bertahan di dalam organisasi karena memiliki keyakinan terhadap tujuan organisasi.

2. HIPOTESIS

- H₁: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₂: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- H₃: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₄: Komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₅: Komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H₆: Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

MODEL PENELITIAN

*Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper
Universitas Muhammadiyah Surakarta*



3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Salatiga. Sampel penelitian ini adalah 3 pegawai yang bekerja di bagian keuangan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kota Salatiga. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampling diambil berdasarkan kuesioner yang dikembalikan oleh responden.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

a. Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam Utama (2017) berdasarkan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) adalah: 1. Relevan; 2. Andal; 3. Dapat dibandingkan; 4. Dapat dipahami.

b. Variabel independen

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

Karakteristik sistem akuntansi keuangan daerah dalam Utama (2017) diukur dengan 4 indikator yaitu: 1. Identifikasi; 2. Pengklasifikasian; 3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas; 4. Menghitung masing-masing pengaruh operasi

2. Kompetensi sumber daya manusia

Indikator dalam mengukur kompetensi sumber daya manusia menurut (Hutapea dan Nurianna) dalam Risman dan Kamalilah (2018) yaitu : 1. Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan; 2. Keterampilan individu; 3. Sikap kerja

3. Sistem pengendalian intern

Indikator dalam mengukur Sistem pengendalian intern menurut Sari (2016) adalah: 1. Lingkungan pengendalian; 2. Penilaian resiko; 3. Kegiatan pengendalian; 4. Sistem informasi dan komunikasi; 5. Pemantauan

c. Variabel Moderasi

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi. Indikator untuk mengukur komitmen organisasi menurut Mowday et al dalam Suarmika dan Suputra (2017) yaitu: 1. Identifikasi dengan organisasi; 2. Keterlibatan; 3. Loyalitas

Metode Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran dari suatu data yang bisa dilihat dari *mean*, maksimum, minimum dan standar deviasi.

b. Pengujian instrumen

Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas data

c. Uji Asumsi Klasik

Untuk uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, dengan persamaan $Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4SNM_1 + B_5SNM_2 + B_6SNM_3 + e$

Tabel 4.11
Hasil Uji Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	33.447	.520		64.324	.000
	X1	1.123	.319	.341	3.516	.001
	X2	.199	.335	.060	.594	.555
	X3	.724	.304	.220	2.380	.021
	Z	1.536	.305	.466	5.032	.000
	SNM1	.080	.492	.015	.163	.871
	SNM2	.030	.459	.007	.065	.948
	SNM3	.988	.400	.219	2.469	.017

a. Dependent Variable: Y

Maka persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah:

$$Y = 33,447 + 1,123X_1 + 0,199X_2 + 0,724 X_3 + 0,080 SNM_1 + 0,030 SNM_2 + 0,988 SNM_3 + e$$

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *Adjusted R*² = 0,696= 69,6%. Ini berarti besarnya pengaruh SNM₃, X₁, SNM₂, SNM₁, Z, X₃,X₂ adalah 69,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil uji statistik F adalah 17,009 dan nilai signifikansinya adalah 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini baik.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa ke-6 variabel yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dimasukkan dalam regresi memiliki signifikansi masing-masing yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,001, kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,555, sistem pengendalian intern sebesar 0,021, komitmen organisasi sebesar 0,000, moderasi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,871, moderasi kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,984 dan moderasi sistem pengendalian intern sebesar 0,017.

Pembahasan

a. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil regresi variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diperoleh nilai t sebesar 3,516 dengan signifikansi $0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa **H₀ ditolak** dan H_a diterima. Jadi semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan Yusrawati (2015), Yuliani dan Agustini (2016) dan Andini dan dan Utama (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil regresi variabel kompetensi sumber daya manusia diperoleh nilai t sebesar 0,954 dengan signifikansi $0,555 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kompetensi sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa **H₀ diterima** dan H_a ditolak.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Yeni *et al* (2016), Yuliani dan Agustini (2016) dan Siwambudi *et al* (2017 yang

membuktikan bahwa Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

c. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil regresi variabel sistem pengendalian intern diperoleh nilai t sebesar 2,380 dengan signifikansi $0,021 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel sistem pengendalian intern. Hal ini menunjukkan bahwa **H₀ ditolak** dan H_a diterima. Jadi semakin baik sistem pengendalian intern maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Sumarni (2016), Yeny *et al* (2016) dan Siwambudi *et al* (2017). menyatakan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .

d. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi.

Hasil regresi SNM1 diperoleh nilai t sebesar 0,163 dengan signifikansi $0,871 > 0,05$, Jadi **H₀ ditolak** dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau kurangnya komitmen organisasi dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut tidak dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian ini didukung Sumarni (2016) bahwa komitmen organisasi sebagai moderasi tidak dapat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, komitmen organisasi hanya dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan tetapi tidak dapat memoderasi.

e. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi.

Hasil regresi SNM2 diperoleh nilai t sebesar 0,065 dengan signifikansi $0,948 > 0,05$, Jadi **H₀ diterima** dan H_a ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti bahwa semakin tinggi atau kurangnya komitmen organisasi dalam kompetensi sumber daya manusia tersebut tidak dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian ini didukung oleh Sanjaya (2017) dan Siwambudi *et al* (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimoderasi *Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*

oleh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

f. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi.

Hasil regresi SNM3 diperoleh nilai t sebesar 2,469 dengan signifikansi $0,017 < 0,05$, Jadi **H₀ ditolak** dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini berarti komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan Sanjaya (2017) bahwa semakin tinggi komitmen organisasi dalam sistem pengendalian intern yang dilakukan maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin baik atau semakin buruknya kompetensi sumber daya manusia tidak akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Sistem pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin baik atau buruknya komitmen organisasi tidak akan mempengaruhi baik atau buruknya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik atau buruknya komitmen organisasi tidak akan mempengaruhi baik atau buruknya kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya semakin baik komitmen organisasi pada organisasi maka akan mempengaruhi baik atau buruknya sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka saran yang dianjurkan bagi penelitian selanjutnya adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya pada saat pengisian kuesioner berada di tempat responden agar dapat mengawasi langsung proses pengisian kuesioner.
2. Menambah variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
3. Menambah jumlah responden penelitian.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Armel, Raja Y G (2017), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai), *JOM Fekon*, Vol.4 No.1, 105-119.
- [2] Evicahyani, Sagung Inten., Setiawina, Nyoman Djinar (2106), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol.5 No.3, 403-428.
- [3] Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <http://news.okezone.com/read/2016/06/03/512/1405667> diakses 25 Oktober 2018.
- <https://www.antaraneews.com/berita/588478/bpk-jumlah-daerah-dengan-opini-wtp-meningkat> diakses 23 Oktober 2018.
- <http://ekonomi.kompas.com> diakses 20 Desember 2018.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf> diakses 21 Desember 2018
- <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/11/sistem-akuntansi-keuangan-pemerintah-daerah/> diakses 20 Desember 2018
- <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/08/kualitas-laporan-keuangan/> diakses 21 Desember 2018
- http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri_59_2007.pdf diakses 21 Desember 2018
- <http://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Peraturan-Pemerintah-Nomor-60-Tahun-2008-Tentang-Sistem-Pengendalian-Intern-Pemerintah.pdf> diakses 21 Desember 2018
- [4] Kiranayanti, Ida Ayu Enny., Erawati, Ni Made Adi (2016), Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16 No. 2, 1290-1318.
- [5] Marami, Miranda Miryam., Morasa, Jenny., Wokas, Heince R.N (2018), Pengaruh Penerapan Good Governance dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Padda Pemerintah Kota Manado, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol.13 No. 3, 563-570.

- [6] Patra, A.Dahri Adi., Bustami, Lanteng., Hasriani (2015), Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Akuntansi* Vol.02. No.01, 1-9.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 1.
- Republik Indonesia, Permendagri No 59 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- [7] Risman dan Kamalilah (2018), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimediasi Oleh Komitmen Organisasi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis* Vol. X. No. 1, 158-172.
- [8] Sanjaya, Aditya (2017), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar), *JOM Fekon*, Vol.4 No.1, 366-380.
- [9] Sari, Nilam (2017), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sap, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo), *JOM Fekon*, Vol. 3 No. 1, 1478-1490.
- [10] Siwambudi, I Gusti Ngurah., Yasa, Gerianta Wirawan., Badera, I Dewa Nyoman., (2017), Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vol.6, No.1, 385-416.
- [11] Sugiyono. (2013). *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- [12] Suarmika, I Gusti Lanang, dan Suputra, I Dewa Gede Dharma (2016), Kemampuan Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas Sdm Dan Penerapan Sikd Pada Kualitas Lkpd Kabupaten Karangasem, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2921-2950.
- [13] Sumarni, Lili (2016), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kota Pekanbaru), *JOM Fekon* Vol. 3 No. 1, 462-476.
- [14] Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [15] Utama, Reno Julia (2017), Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu), *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 1, 1429-1443.

www.semarang.bpk.go.id diakses 23 Oktober 2018.

www.radioidola.com diakses 25 Oktober 2018.

- [16] Yuliani, Nur Laila., Agustini, Rahmawati Dwi (2016), Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jurnal Bisnis & Ekonomi , Volume 14, Nomor 1, 56-64.